

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2013, organisasi gerakan kemerdekaan Papua Barat, West Papua National Council for Liberation (WPNCL) mengajukan permohonan keanggotaan kepada Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendapatkan dukungan dan platform untuk menyuarakan kepentingannya dalam upaya melepaskan diri dari wilayah kedaulatan Indonesia. Permohonan tersebut ditolak, kemudian pada tahun 2014 kelompok yang sama bergabung dengan dua kelompok gerakan kemerdekaan Papua Barat lainnya dibawah satu payung organisasi bernama United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP kembali mengajukan permohonan keanggotaan kepada MSG pada tahun 2015 dengan tujuan yang sama. Permohonan tersebut kembali ditolak, tetapi ULMWP diberikan status sebagai observer mewakili diaspora Papua Barat. Untuk menganalisis alasan dibalik penolakan tersebut peneliti menggunakan teori institusionalisme rasional dalam organisasi internasional sebagai alat bantu analisis.

Teori institusionalisme rasional dalam proses pembuatan kebijakan sebuah institusi internasional menjelaskan tiga faktor utama yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan dan output kebijakan yang dihasilkan dari proses tersebut. Tiga faktor tersebut yaitu jumlah aktor (*number of actors*), heterogenitas preferensi (*preference heterogeneity*), aturan dalam pengambilan kebijakan (*decision rules*).

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, pertama, jumlah aktor dalam proses pembuatan kebijakan MSG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap output kebijakan yang diambil terkait permohonan keanggotaan yang diajukan oleh ULMWP. Kedua, heterogenitas preferensi merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar diantara ketiga faktor utama yang menjadi acuan yang peneliti gunakan dalam menganalisis alasan MSG menolak permohonan keanggotaan dari ULMWP. Perbedaan preferensi negara-negara anggota secara individual dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya dan kalkulasi untung rugi yang akan didapatkan oleh negara terhadap keputusan yang diambil. Hal ini berkaitan dengan faktor ketiga, yaitu sistem pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang ditentukan dari hasil konsensus atau kesepakatan bersama oleh anggota-anggota MSG. sistem konsensus membutuhkan suara bulat dalam pengambilan keputusannya. untuk menentukan suatu kebijakan akan diambil atau tidak, seluruh anggota yang memiliki preferensinya masing-masing harus memutuskan suara bulat untuk dapat mengambil kebijakan. Pengambilan kebijakan akan terhambat jika satu saja anggota tidak menyetujui keputusan bersama. Sehingga proses negosiasi dan perundingan sampai output yang dihasilkan harus mengikuti persetujuan semua anggota berdasarkan pertimbangan-pertimbangan preferensi yang ada.

Ditemukan bahwa diantara ketiga faktor tersebut, faktor yang berpengaruh paling signifikan terhadap keputusan MSG untuk menolak permohonan keanggotaan ULMWP adalah heterogenitas preferensi yang dimiliki para anggota MSG. Preferensi masing-masing anggota yang dipengaruhi oleh faktor internal

yaitu kepentingan nasionalnya dan faktor eksternal yaitu kepentingan dan hubungan diplomatik negara anggota dengan Indonesia. Faktor selanjutnya yang turut mempengaruhi output keputusan MSG tersebut yaitu aturan pemungutan suara yang menggunakan metode konsensus. Berbeda dengan metode voting yang pengambilan keputusannya bersifat objektif dan cepat, pemungutan suara dengan metode konsensus membutuhkan perundingan yang menemui kesepakatan bersama antar anggota dengan mempertimbangkan kepentingan individual negara dan kepentingan bersama organisasi. Dalam organisasi MSG, peneliti tidak menemukan signifikansi jumlah aktor terhadap proses pengambilan kebijakan dan output yang dihasilkannya.

